



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MENGATASI DISPARITAS

DENGAN TATA KELOLA HUTAN dan

KAPASITAS SDM

Indonesia Development Forum 2018, MENPPN/BAPPENAS RI

Jakarta, 10 Juli 2018

KEBIJAKAN PENATAAN LAHAN

I

**KEBIJAKAN
TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) *dan*
PERHUTANAN SOSIAL**

II

PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOLA (SDM)

III

CONTOH-CONTOH TAPAK

IV

CATATAN PENUTUP

V



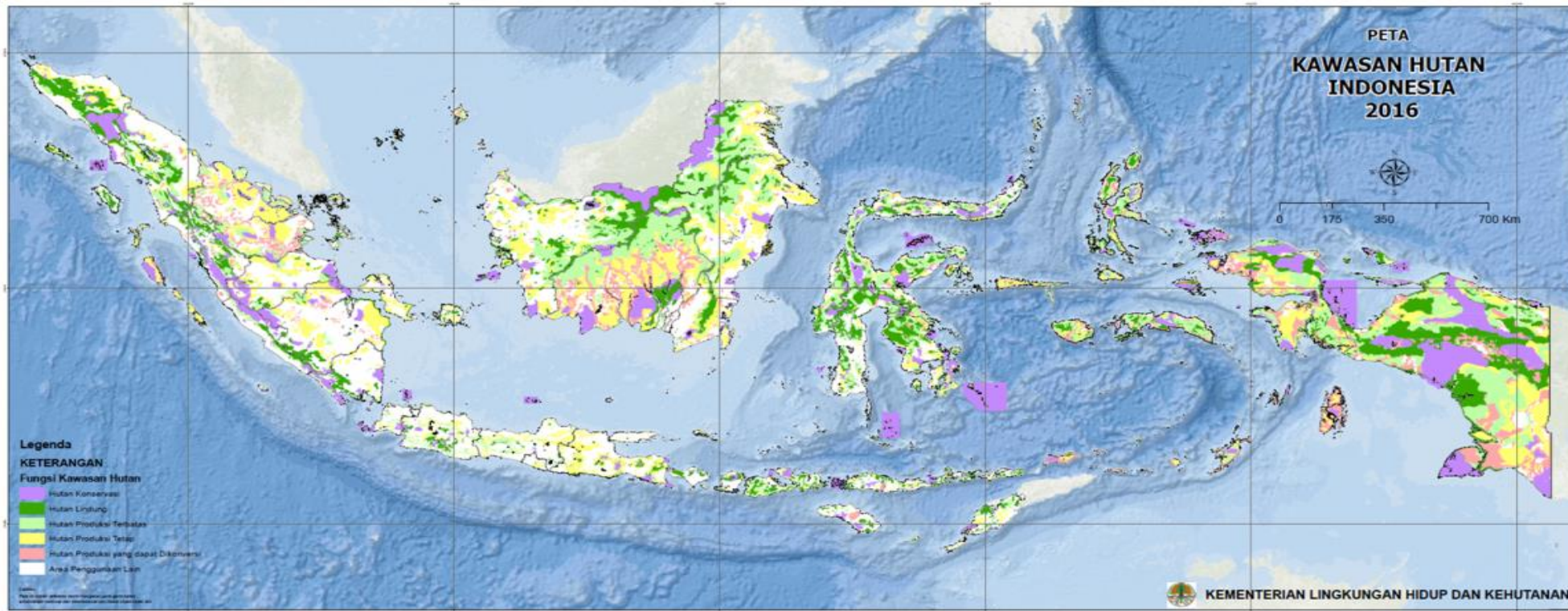
KEBIJAKAN PENATAAN LAHAN



KEBIJAKAN PENATAAN LAHAN

1. kebijakan penataan lahan untuk kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan dan hak ulayat Di dalam Kawasan Hutan dan Di luar Kawasan Hutan
2. Di dalam kawasan hutan penataan lahan dilakukan untuk memenuhi tuntutan :
 - a. dinamika kebutuhan pembangunan nasional,
 - b. manfaat yang berkeadilan pada masyarakat,
 - c. mengurangi konflik tenurial terkait dengan permukiman, fasum dan fasos,
 - d. Tetap terjamin keberadaan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan distribusi fungsi hutan yang optimal (Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi).
3. Di luar kawasan hutan penataan lahan dilakukan untuk memenuhi tuntutan :
 - a. dinamika kebutuhan pembangunan nasional,
 - b. manfaat yang berkeadilan pada masyarakat,
 - c. mengurangi konflik tenurial terkait penguasaan, penggunaan dan kepemilikan, dan
 - d. Tetap terjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

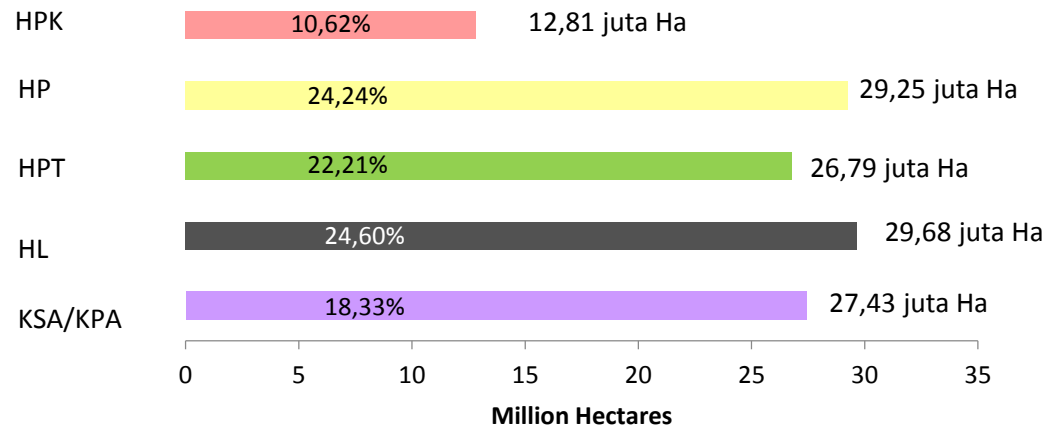
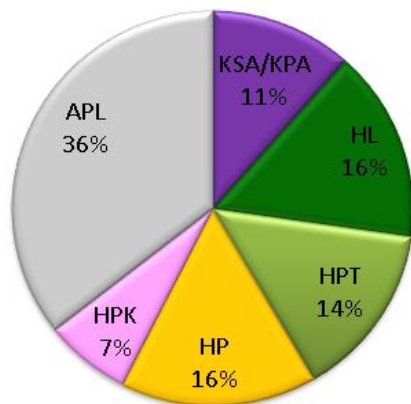
PETA FUNGSI KAWASAN HUTAN INDONESIA



Kawasan Hutan:
63% dari luas wilayah daratan

Total Kawasan Hutan seluas
120,65 juta ha
(daratan)

Fungsi Kawasan



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN

1. Dalam kawasan hutan dilakukan :
 - a. Pemanfaatan Hutan,
 - b. Penggunaan Kawasan Hutan,
 - c. Perubahan fungsi, dan Perubahan peruntukkan Kawasan Hutan (Pelepasan Kawasan Hutan)

2. Pemanfaatan Hutan meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan melalui pemberian izin:
 - a. IUPHHK-HA (Hutan Alam),
 - b. IUPHHK-HT (Hutan Tanaman)
 - c. IUPHHK-RE (Restorasi Ekosistem)
 - d. Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Kemitraan, Hutan Adat dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

3. Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (infrastruktur, pertambangan, ketenagalistrikan, hankam), Izin dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk litbang, diklat serta religi.

4. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

RASIO GINI INDONESIA

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9 ¹
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 ¹
Koefisien Gini/ Rasio Gini	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

¹ Maret 2016

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

*Ketimpangan melebar ditunjukkan dengan besarnya angka rasio gini
Keterangan bahwa 2017 sementara rasio gini 0,39

b. Ketimpangan Penguasaan Tanah (Rumah Tangga Tani)



Sumber: BPS (diolah)

KONDISI PEMANFAATAN HUTAN, PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Kontribusi Kawasan Hutan	Swasta (Perusahaan)	Masyarakat	Kepentingan Umum	Total
	Luas (Ha)	Luas (Ha)		
IPPA/Jasling/KK	51.363			51.363
Pemanfaatan Hutan (HPH, HTI, dan Hutan Sosial)	33.316.788	822.370		34.139.158
Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH)	404.956	488	40.995	446.439
Pelepasan Kawasan Hutan *	6.689.996	926.072	205	7.616.273
JUMLAH	40.463.103	1.748.931	41.200	42.253.234
Persentase (%)	95,76	4,14	0,10	100

* Tidak Termasuk pelepasan dari proses tata ruang

■ Swasta (Perusahaan) ■ Masyarakat ■ Kepentingan Umum



**KEBIJAKAN
TANAH OBYEK
REFORMA AGRARIA
(TORA)
dan
PERHUTANAN SOSIAL**



REFORMA AGRARIA DARI KAWASAN HUTAN DAN PERHUTANAN SOSIAL MENDORONG MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERKELANJUTAN, TANPA KONFLIK DAN RAMAH LINGKUNGAN

KONDISI

- persoalan kemiskinan
- Ketimpangan dan konflik :
 - a.penguasaan,
 - b.pemilikan,
 - c.penggunaan
 - d.Pemanfaatan tanah
- ketidakadilan sosial ekonomi rakyat
- kerusakan sumber daya alam

•Reforma
Agraria dari
kawasan hutan
•Perhutanan
Sosial

RPJM
2015-2019

TUJUAN

- Masyarakat Adil makmur:
 - a. keadilan
 - b. kesejahteraan
- Berkelanjutan
- Ramah lingkungan
- Kemandirian ekonomi

Kebijakan Dan Strategi TORA dari Kawasan Hutan dan PS

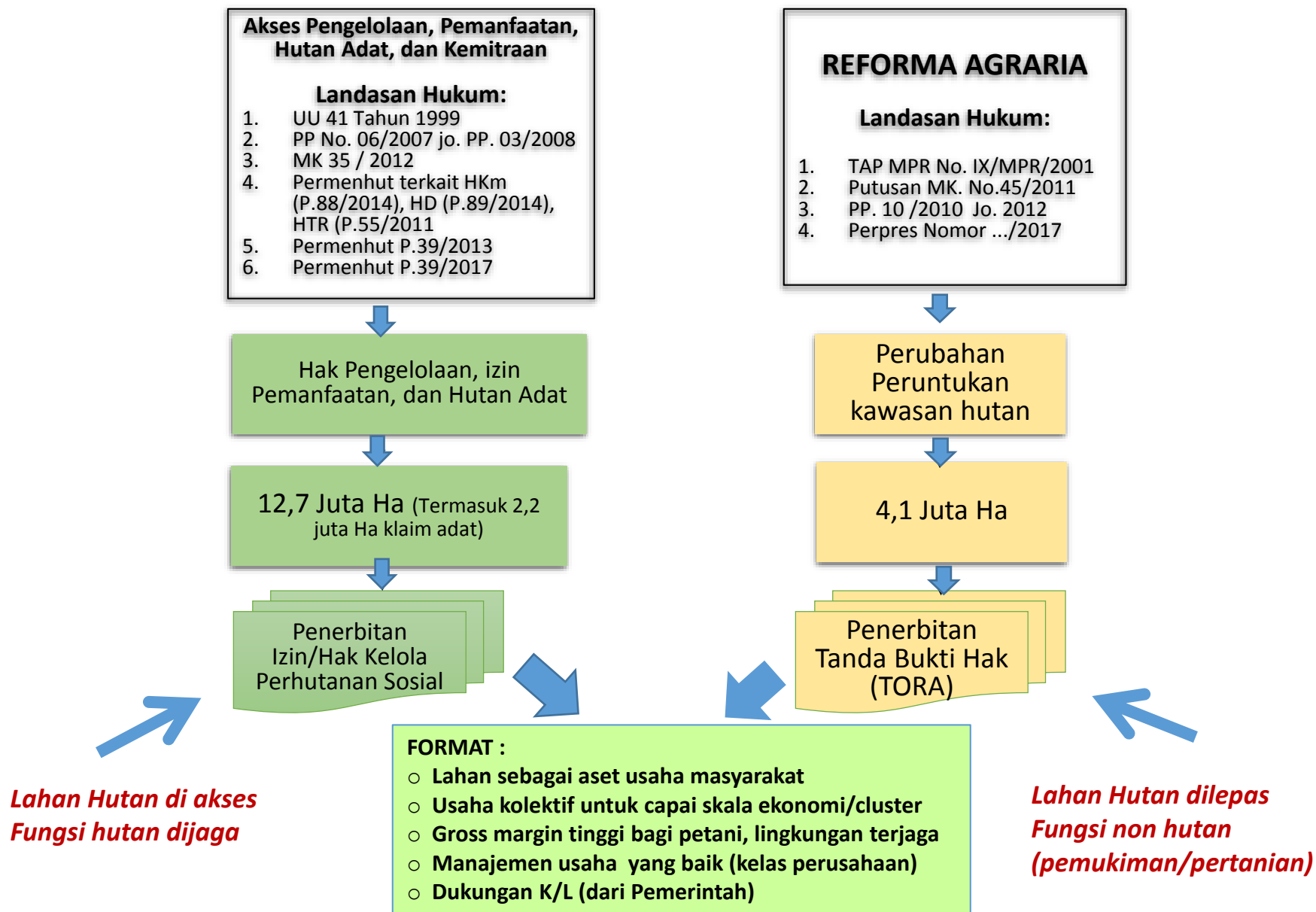
ARAH KEBIJAKAN :

- Redistribusi Lahan dari Kawasan Hutan
- Akses Kelola Lahan di Kawasan Hutan
- Pemberdayaan masyarakat per KK yang berpenghasilan rendah
- Produktivitas Masyarakat
- Pertumbuhan Wilayah Domestik

STRATEGI :

- Penguatan program pemberdayaan masyarakat desa (hutan)
- Pembangunan dengan sistem kluster
- Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat
- Peningkatan kapasitas manajemen usaha masyarakat
- Teknologi *land base bussines* dan pengolahan produksi
- Membangun koneksi antara usaha petani, UKM dan industri untk pertumbuhan ekonomi domestik

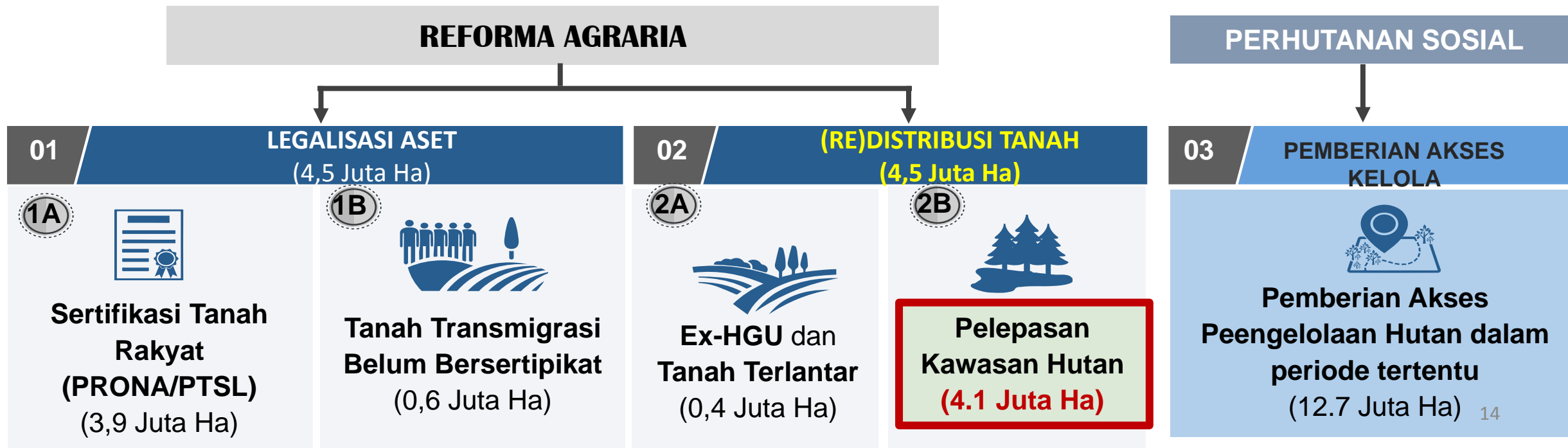
Akses Masyarakat Setempat ke Sumber Daya Hutan (RPJM 2015-2019)



NAWACITA RPJMN 2015-2019



- Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (**teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha**)
- Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas **12,7 juta ha**.



ALOKASI INDIKATIF TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DARI KAWASAN HUTAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

A. TORA

- Penetapan Menteri LHK No.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
- Potensi TORA Seluas ± **4.853.549 ha**

B. PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial)

- Penetapan Menteri LHK No. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017
- Potensi Perhutanan Sosial Seluas ± **13.462.102 ha**
- Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat

Perbedaan Perhutanan Sosial Dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan

1. Perhutanan sosial diberikan akses kelola atau izin pemanfaatan hutan atau kemitraan dengan pengelola atau pemegang izin.
2. Untuk TORA dari Kawasan Hutan setelah ada pelepasan atau perubahan batas dari Kawasan Hutan dapat diberikan *title* hak .

PEMERATAAN EKONOMI
DENGAN TIGA PILAR



- 1) LAHAN (dan ASET)
- 2) KESEMPATAN (Usaha)

- 3) PENINGKATAN KAPASITAS
SDM (Vocational Training)



PETA INDIKATIF TANAH OBJEK REFORMASI AGRARIA DARI KAWASAN HUTAN

No	Kriteria	SK. 180	SK.6979 (Revisi 1)	SK.3154 (Revisi 2)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.937*	719.636*	417.485*
2	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028
4	Permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382
5	Permukiman, fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965
Jumlah		4.853.550	4.857.798	4.949.737

(*) merupakan 20 % dari luas yang tergambar pada peta

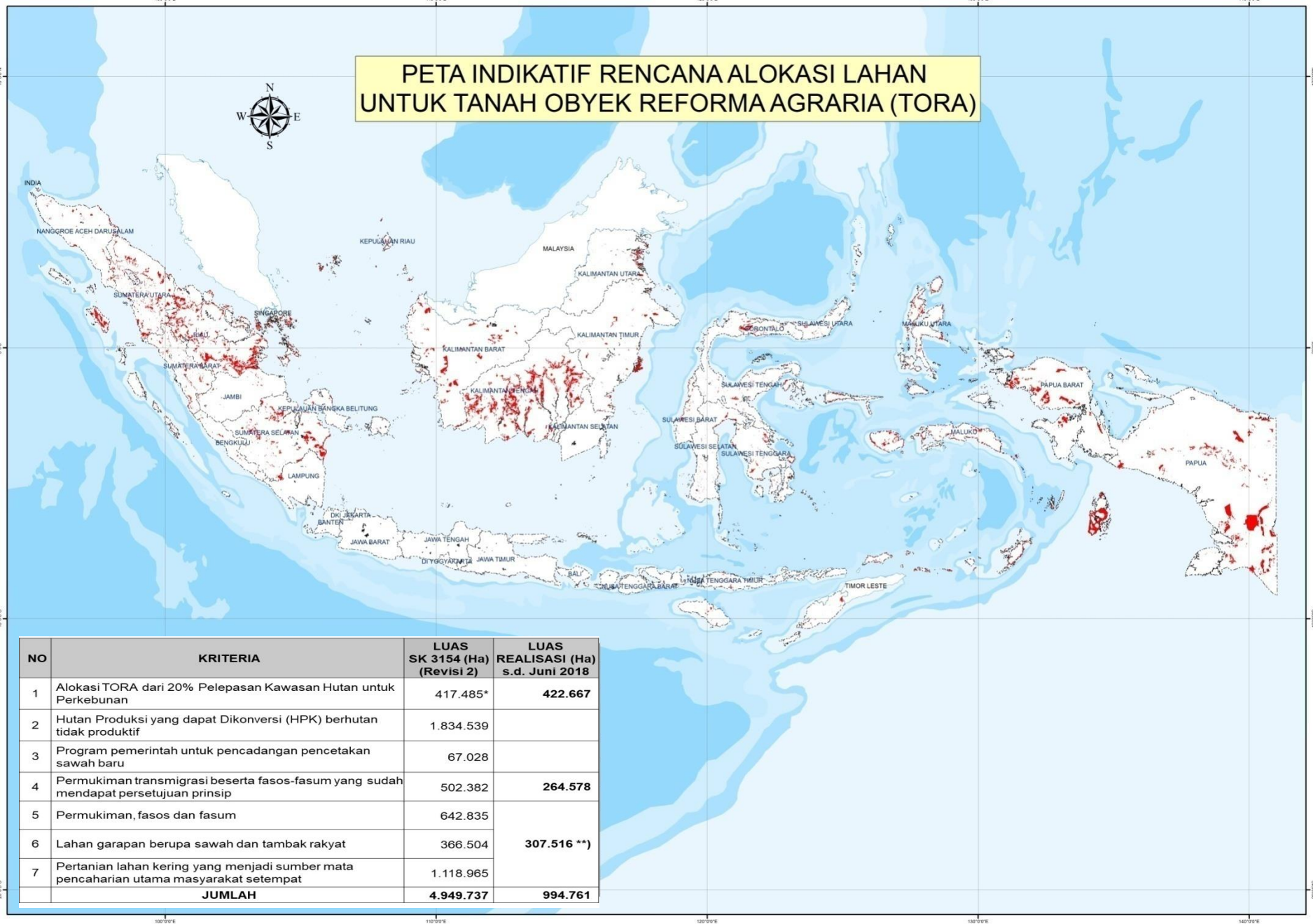
REALISASI TORA s.d. Mei 2018

NO	KRITERIA	LUAS SK 3154 (Ha) (Revisi 2)	LUAS REALISASI (Ha) s.d. Juni 2018
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	417.485*	422.667
2	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.834.539	
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	67.028	
4	Permukiman transmigrasi beserta fasos-fasum yang sudah mendapat persetujuan prinsip	502.382	264.578
5	Permukiman, fasos dan fasum	642.835	307.516 **)
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.504	
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.118.965	
	JUMLAH	4.949.737	994.761

() merupakan 20 % dari luas yang tergambar pada Peta*

*** pada kriteria 5, 6 dan 7 terdapat revisi realisasi berdasarkan hasil audit BPK RI di Provinsi Riau dan hasil tata batas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang belum selesai.*

**PETA INDIKATIF RENCANA ALOKASI LAHAN
UNTUK TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)**



NO	KRITERIA	LUAS SK 3154 (Ha) (Revisi 2)	LUAS REALISASI (Ha) s.d. Juni 2018
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	417.485*	422.667
2	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.834.539	
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	67.028	
4	Permukiman transmigrasi beserta fasos-fasum yang sudah mendapat persetujuan prinsip	502.382	264.578
5	Permukiman, fasos dan fasum	642.835	
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.504	307.516 **)
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.118.965	
	JUMLAH	4.949.737	994.761

SKEMA PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (PermenLHK No.83/2016)



P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016

Tentang
Perhutanan Sosial
tanggal 25 Oktober 2016



Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

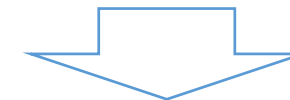
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017

tentang

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja

Perum Perhutani

tanggal 9 Juni 2017



Khusus di Pulau Jawa

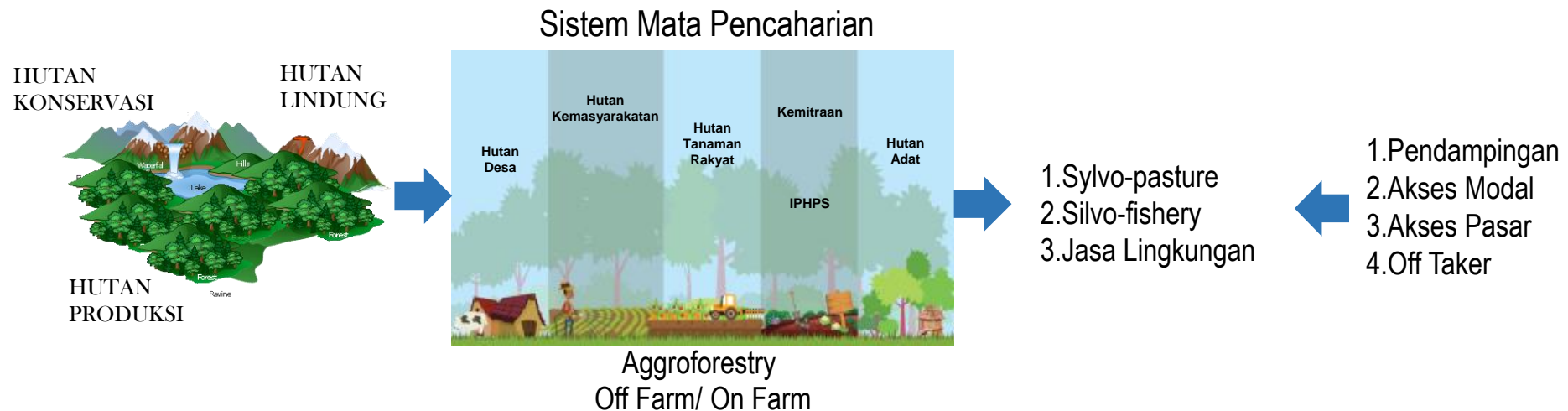
PEMANFAATAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PASAL 51 DAN 52/P.83 2016)

BENTUK PERHUTANAN SOSIAL	FUNGSI KAWASAN HUTAN	PEMANFAATAN	PEMEGANG HAK/IZIN
1. Hutan Desa/ Nagari	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jasa lingkungan (air, ekowisata, Sertifikat Karbon) HHBK.	Lembaga Pengelola Hutan Desa/Nagari/Adat (LPHD/N/A)
2. Hutan Tanaman Rakyat	Hutan Produksi	Kayu Industri, Pangan, energi dan Jasa Lingkungan.	Koperasi, industri rakyat, Proyeksi dukungan untuk HTI
3. Hutan Kemasyarakatan	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jasa Lingkungan (air, ekowisata, Sertifikat Karbon), Kayu dan HHBK	Kel Tani, Koperasi
4. Kemitraan	Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jasa Lingkungan dan HHBK	Kel Tani, Koperasi
5. Hutan Adat	Hutan Hak dengan Fungsi Konservasi, Lindung dan Produksi (masih diproyeksikan)	Jasa Lingkungan (air, ekowisata, Sertifikat Karbon), Kayu dan HHBK	Kel Masyarakat Hukum Adat

PERHUTANAN SOSIAL

mendukung PENGEMBANGAN SISTEM MATA PENCAHARIAN DI SEKITAR HUTAN

Kelompok Perhutanan Sosial mengelola dan secara berkelompok bekerjasama - saling bergantung satu sama lain - dan terkonsentrasi dalam satu wilayah untuk mengembangkan komoditas tertentu dan tanaman pangan.



Dengan Program Perhutanan Sosial:

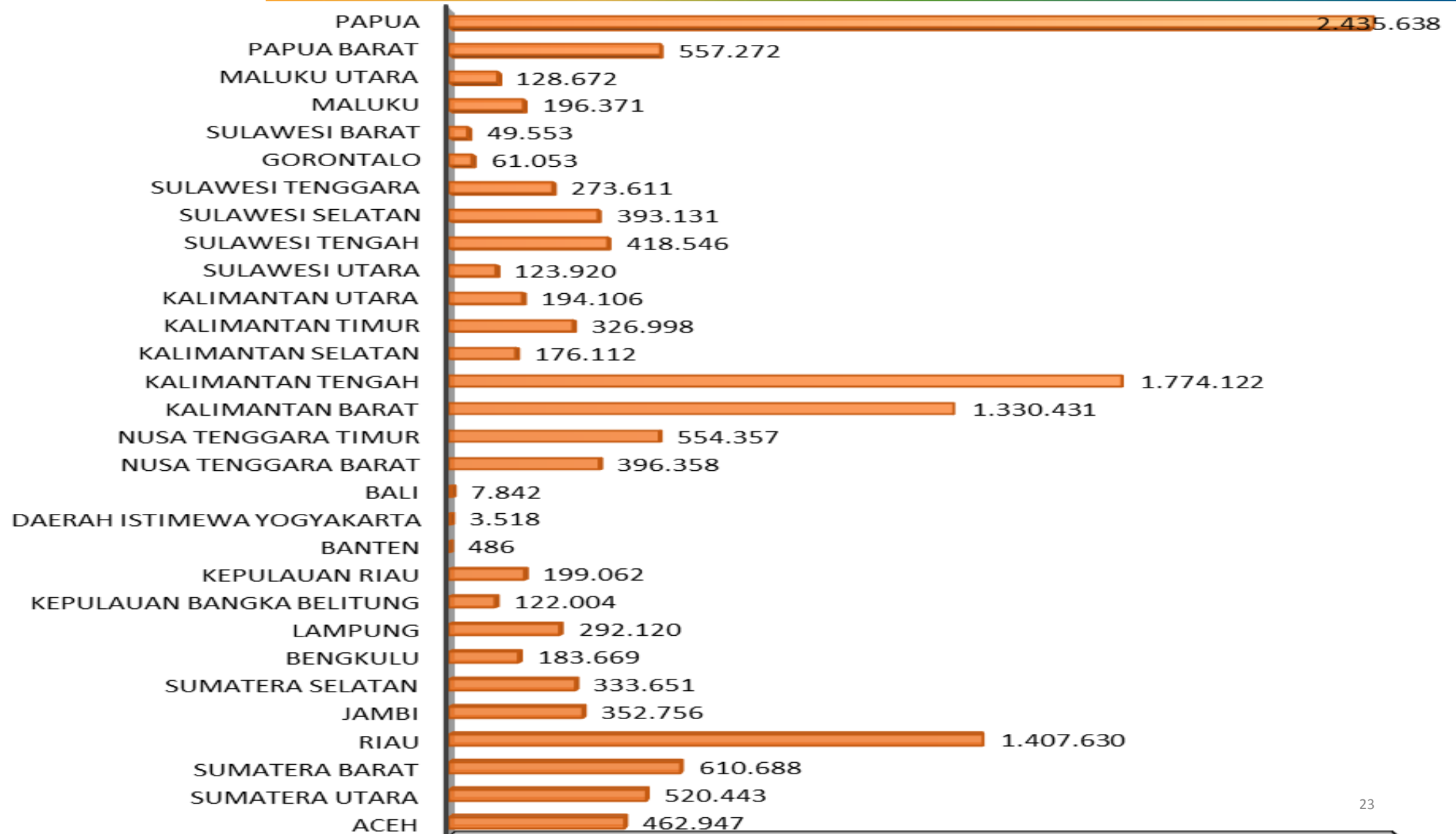
- Masyarakat diberikan hak/izin/pengakuan dan perlindungan pengelolaan kawasan hutan
- Peningkatan tutupan lahan (Stok Karbon Meningkat)



- Pengurangan Kemiskinan
- Pengurangan Pengangguran
- Pengurangan Konflik Sosial
- Sustainable Forest Management

PIAPS PER PROVINSI

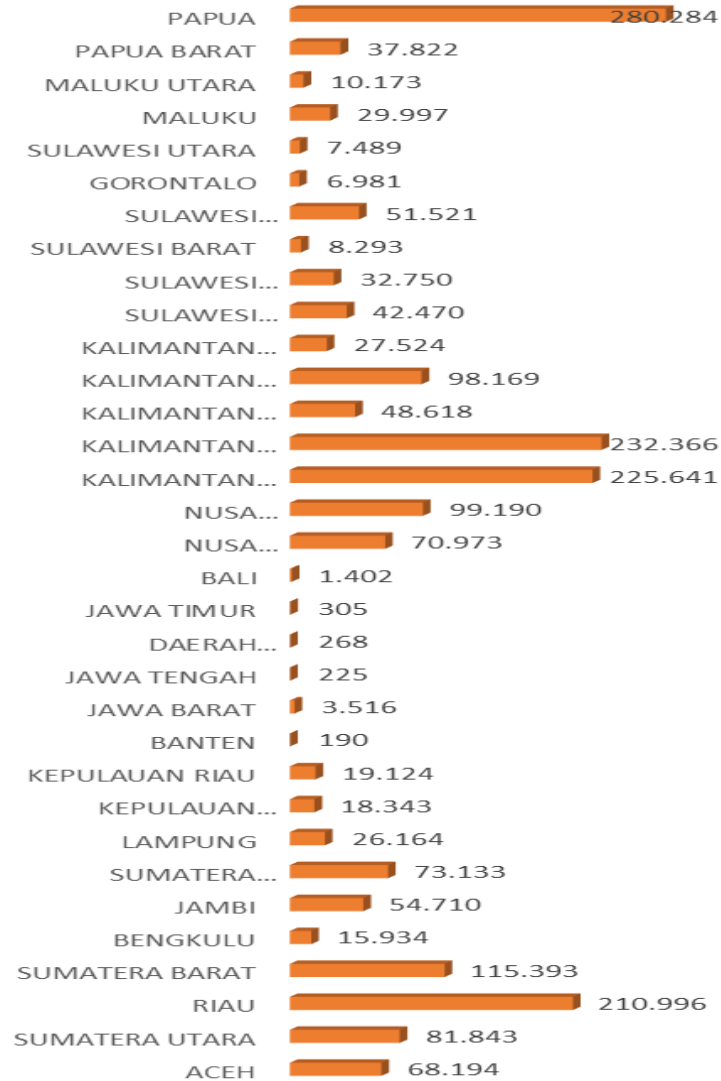
(Revisi 1 dengan Keputusan Menteri Nomor SK.865/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/9/2017)



BLUEPRINT TARGET AREAL PERHUTANAN SOSIAL TAHUN 2018 - 2019

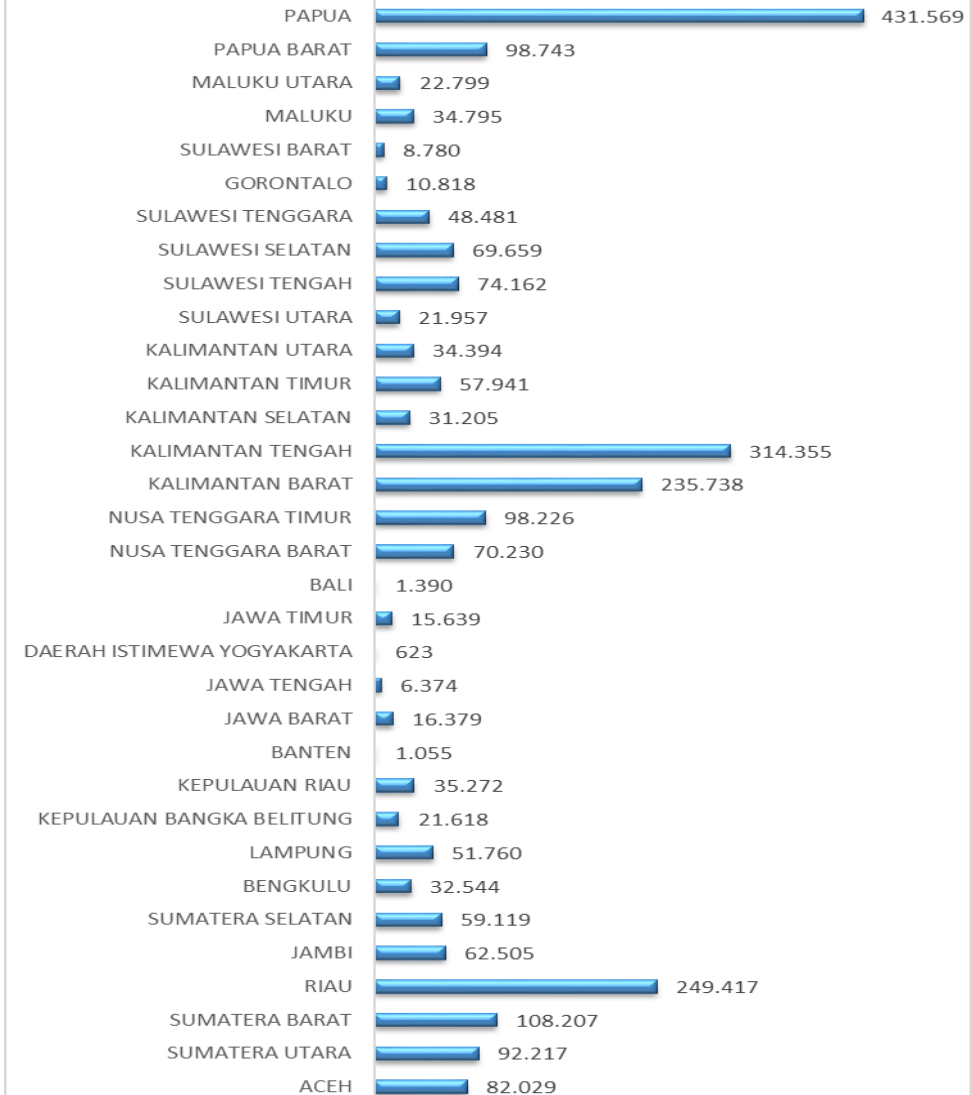
Target per Provinsi

TAHUN 2018



TOTAL 2.000.000 Ha

TAHUN 2019

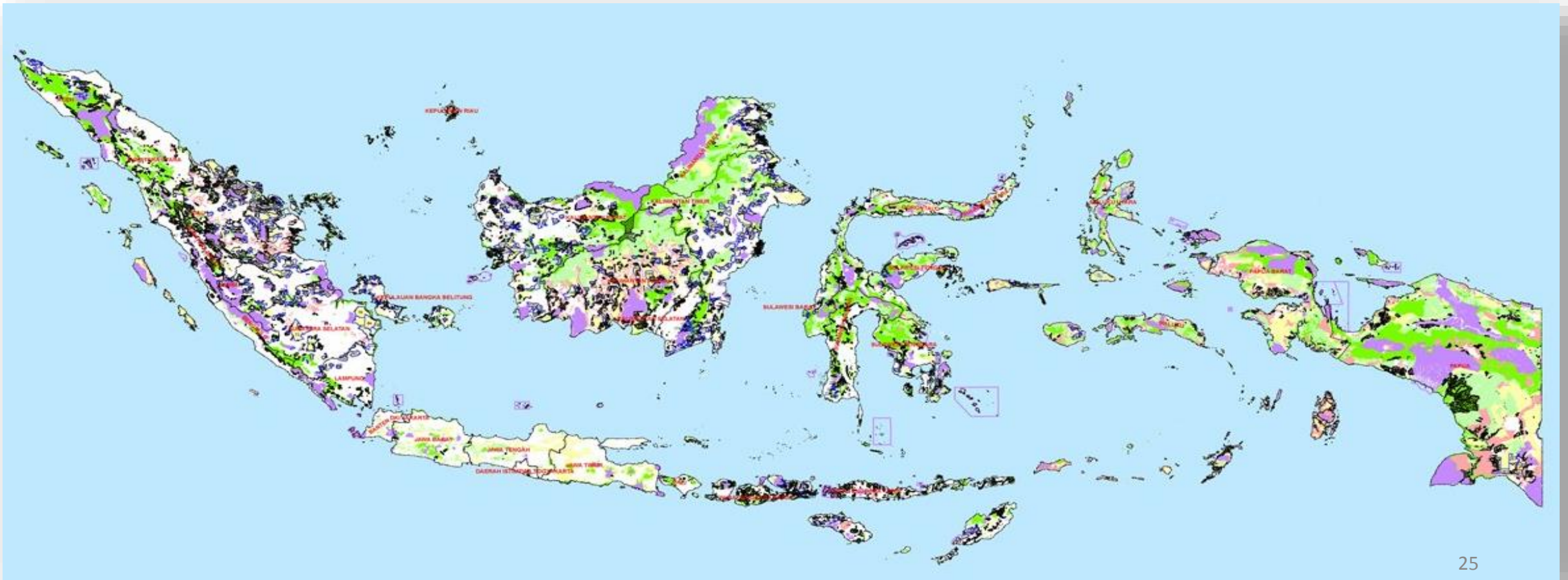


TOTAL 2.540.000 Ha

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial diseluruh Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI LHK NOMOR: [SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/I/2017](#)

16 Januari 2017



CAPAIAN KINERJA PEMBERIAN AKSES KELOLA KAWASAN HUTAN PER PROVINSI

Per Tanggal 21 Juni 2018

REALISASI

1.721.645,07 Ha

± 384.816 KK

4.581 Unit SK

Ijin/Hak

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	899,484.61
2	HKM	420,903.22
3	HTR	269,337.65
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	91,030.35
	B. IPHPS	16,510.90
5	HA	24,378.34
JUMLAH		1,721,645.07

NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi (PIAPS)	Capaian		
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)		
1	ACEH	462,947	39,099.40	21	6,621
2	SUMATERA UTARA	520,443	48,571.65	69	9,364
3	SUMATERA BARAT	610,688	175,092.72	168	101,760
4	RIAU	1,407,630	84,319.00	47	11,374
5	JAMBI	352,756	150,225.62	324	19,895
6	SUMATERA SELATAN	333,651	54,749.45	86	10,972
7	BENGKULU	183,669	37,408.16	90	8,283
8	LAMPUNG	292,120	179,527.73	257	57,151
9	KEP BANGKA BELITUNG	122,004	26,707.26	328	4,125
10	KEP RIAU	199,062	24,119.00	4	2,289
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	-	6,816.76	22	2,375
13	JAWA TENGAH	-	4,538.10	20	2,053
14	YOGYAKARTA	3,518	1,565.88	45	5,005
15	JAWA TIMUR	-	15,152.49	23	11,297
16	BANTEN	486	486.00	1	740
17	BALI	7,842	8,180.00	41	11,621
18	NUSA TENGGARA BARAT	396,358	21,396.36	60	13,106
19	NUSA TENGGARA TIMUR	554,357	30,085.15	103	3,799
20	KALIMANTAN BARAT	1,330,431	223,781.91	98	23,439
21	KALIMANTAN TENGAH	1,774,122	154,096.95	74	12,264
22	KALIMANTAN SELATAN	176,112	29,148.48	53	3,548
23	KALIMANTAN TIMUR	326,998	103,706.15	65	4,855
24	KALIMANTAN UTARA	194,106	15,270.75	45	1,931
25	SULAWESI UTARA	123,920	30,675.01	171	2,917
26	SULAWESI TENGAH	418,546	58,630.25	1,177	11,071
27	SULAWESI SELATAN	393,131	50,246.77	452	27,030
28	SULAWESI TENGGARA	273,611	34,532.31	181	5,622
29	GORONTALO	61,053	8,900.01	89	3,606
30	SULAWESI BARAT	49,553	25,166.06	411	1,160
31	MALUKU	196,371	30,859.40	28	2,225
32	MALUKU UTARA	128,672	25,305.00	22	2,646
33	PAPUA BARAT	557,272	3,545.00	2	79
34	PAPUA	2,435,638	19,740.30	4	530
TOTAL		13,887,067.00	1,721,645.07	4,581	384,753



PENGEMBANGAN KAPASITAS KELOLA (SDM)

PENDAMPINGAN KELOMPOK PASCA IJIN



**PENINGKATAN EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN**

PENINGKATAN KAPASITAS SDM

**PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN**

PENDAMPINGAN

**PENINGKATAN
KAPASITAS SDM**

**SERTIFIKASI/ UJI
KOMPETENSI**

VOKASI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Klasikal
2. Non Klasikal

PENDAMPINGAN

1. Pendampingan KTH di masing-masing Provinsi = **33.642 KTH**
2. Pendampingan Perhutanan Sosial = **4.581 Unit**
3. Pendampingan oleh:
 - Penyuluh Kehutanan (PNS) 3.148 orang;
 - PKSM 4.263 orang;
 - PK Swasta 441 orang;
 - Bakti Rimbawan 1.877 orang

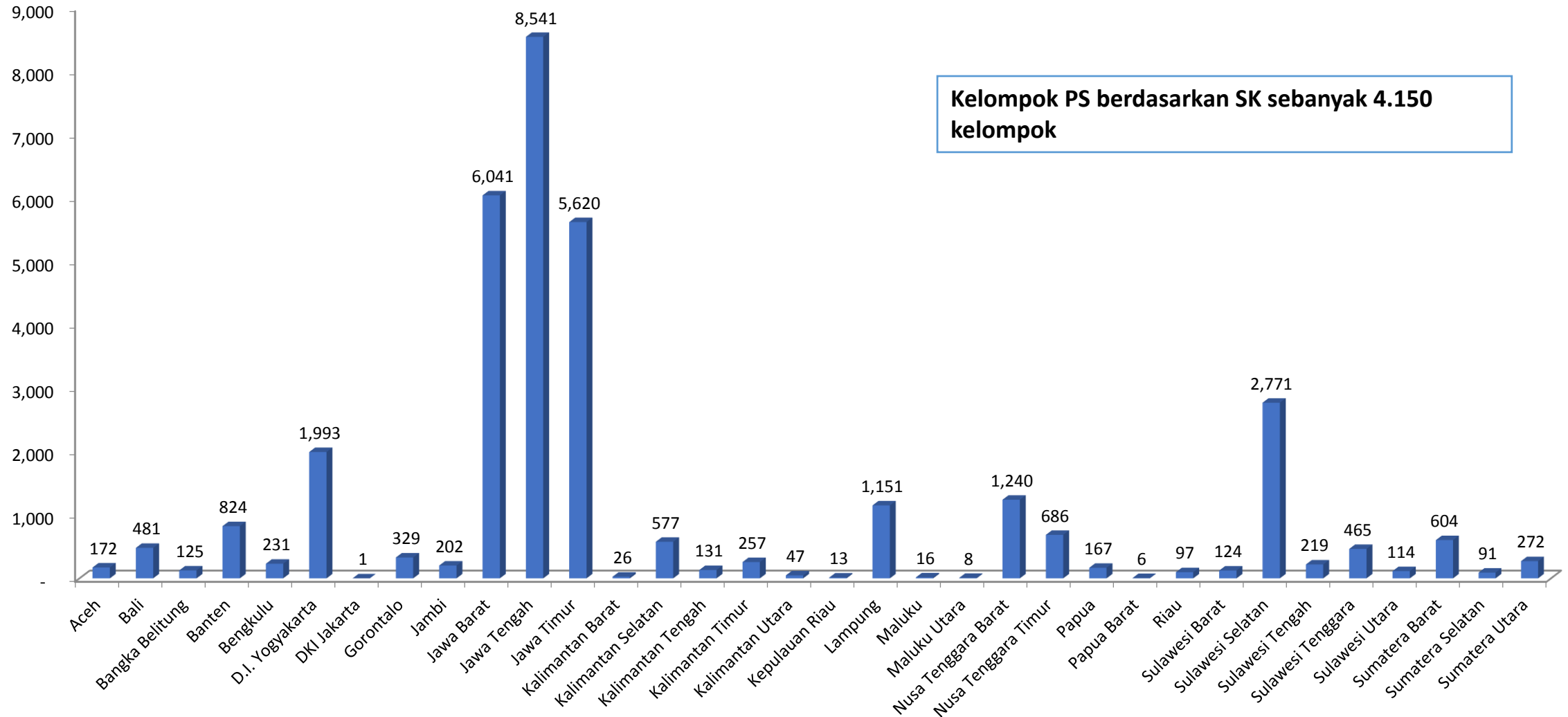
VOKASI

Penyediaan tenaga teknis menengah kehutanan

SERTIFIKASI/ UJI KOMPETENSI

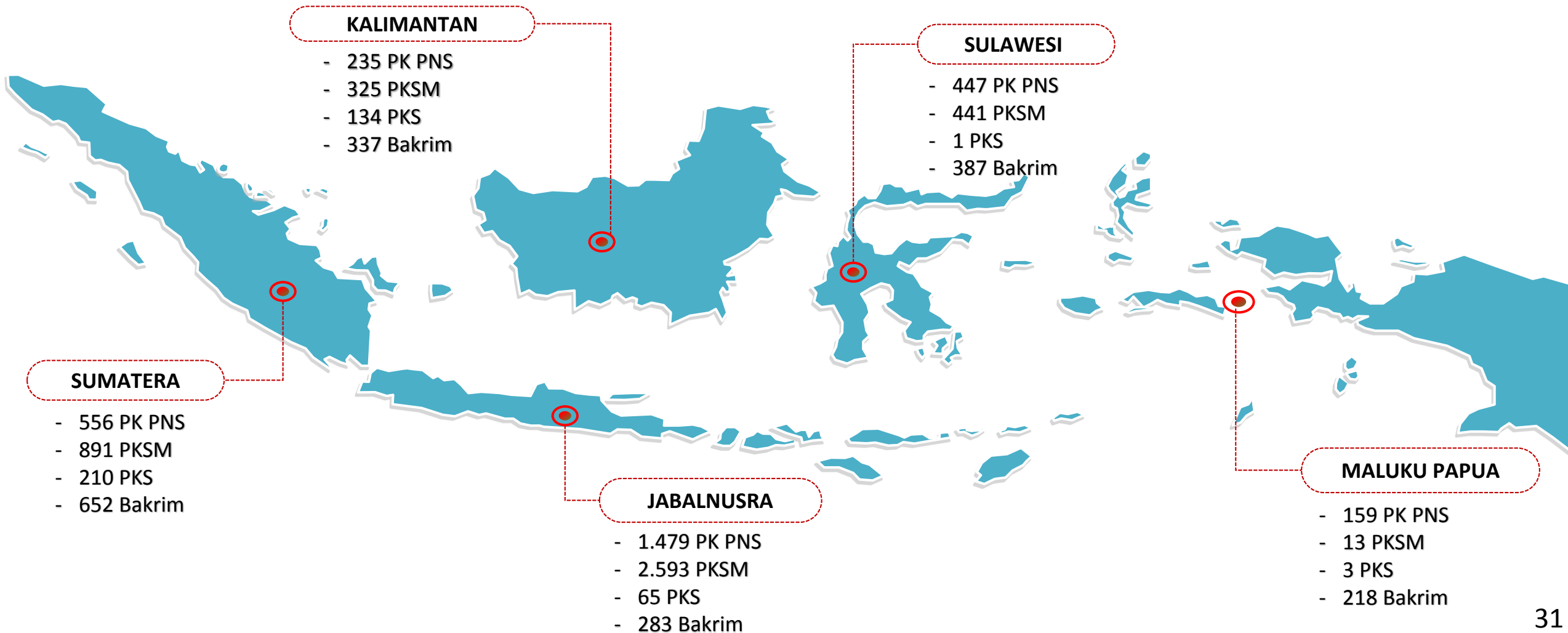
Sebaran KTH

Total s.d. Januari 2018 sebanyak 33.642 kel.

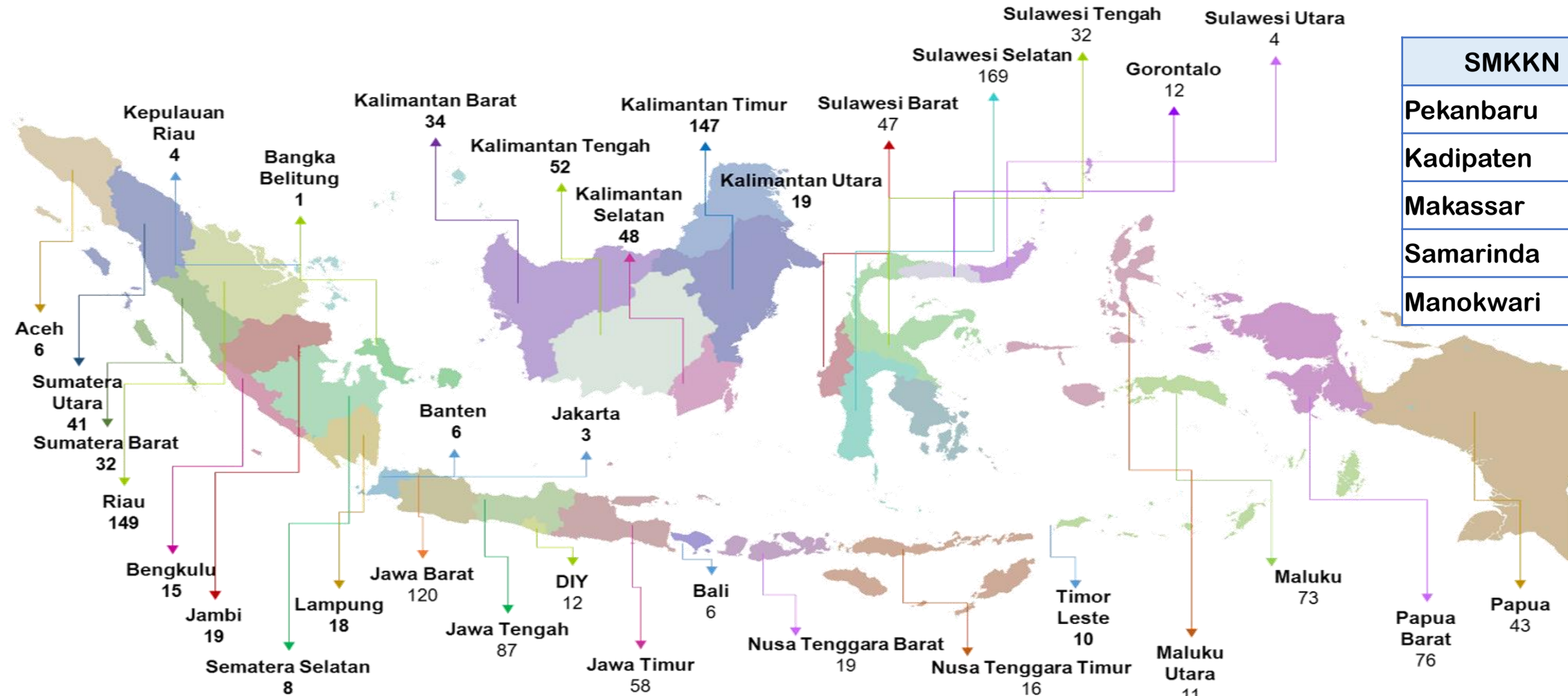


SEBARAN TENAGA PENDAMPING DI INDONESIA

Tenaga Pendamping	Jumlah
Penyuluh Kehutanan PNS	3.148 org
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	4.263 org
Penyuluh Kehutanan Swasta	441 org
Bakti Rimbawan	1.877 org



Pendidikan Vokasi Kehutanan



SMKKN	Σ Siswa
Pekanbaru	288
Kadipaten	305
Makassar	301
Samarinda	322
Manokwari	191

Kompetensi Keahlian :

1. Produksi Hasil Hutan
2. Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
3. Rehabilitasi dan Reklamasi
4. Konservasi Sumber Daya Hutan

STANDAR KOMPETENSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MELIPUTI STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA
(SKKNI), **STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS ASN** DAN
**STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS NON ASN**

- **3 SKKNI Bidang Lingkungan Hidup** : Auditor LH, Pengambil Contoh Uji Air, dan Penyusun AMDAL
- **14 SKKNI Bidang Kehutanan** yang meliputi fungsi Rehabilitasi, Konservasi, Perencanaan, Pemanfaatan

Struktural baik Pusat maupun Daerah
Fungsional LHK yang meliputi Polhut, PEH, Penyuluh Kehutanan, Pengawas LH dan Pedal

NON PNS antara lain :

1. Pendamping KPH
2. Asesor Penanganan Konflik
3. Petugas Lapangan BLU P2H



Mengapa *Distance Learning (E-Learning)*?

Memberikan kesempatan lebih luas dalam peningkatan kapasitas SDM di era Revolusi Industri 4.0 dengan biaya lebih murah dan lebih efisien

SDM APARATUR

- Mandat UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN : Setiap ASN memiliki Hak peningkatan Kompetensi minimal 20 JP / Tahun (Jumlah ASN KLHK ± 17.000 orang yang perlu mendapat akses diklat)
- Target Diklat sesuai RPJMN 7.000 orang dimana setiap tahun baru terpenuhi ± 3.000 orang
- Wilayah layanan KLHK tersebar dari Sabang sampai Marauke

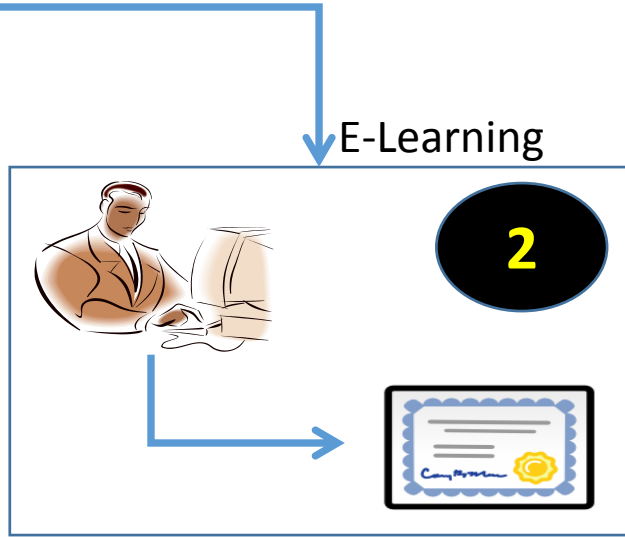
Mengapa *Distance Learning (E-Learning)*?

SDM NON APARATUR

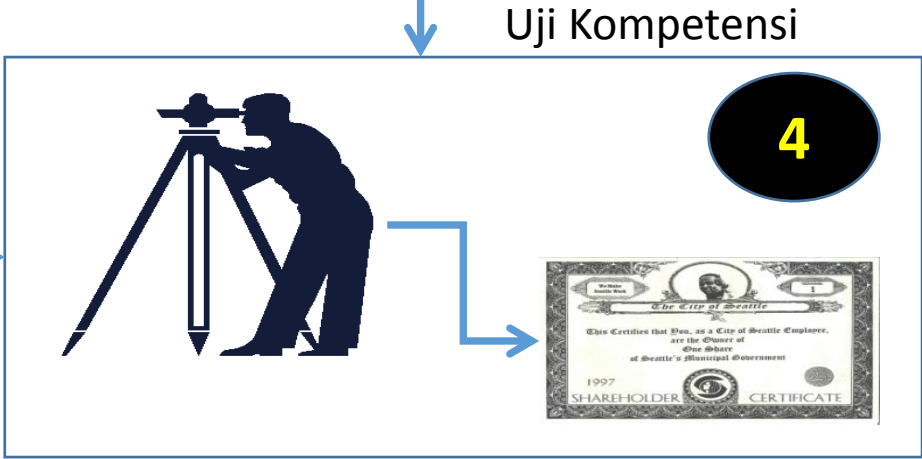
Kebutuhan Kompetensi Teknis SDM Non ASN (Masyarakat & Swasta) bersifat masif untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan LHK yang perlu mendapat akses diklat antara lain :

- Kelompok Tani Hutan (33.642 kelompok)
- Kelompok Penerima Ijin Perhutanan Sosial (4.581 kelompok)
- Tenaga Teknis PHPL (13.198 orang)
- Bakti Rimbawan (1.877 orang)

SKEMA PENINGKATAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI MELALUI *DISTANCE LEARNING*



Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga masing-masing orang dapat mengakses diklat yang menjadi minat dan kebutuhan



***E-LEARNING* KLHK**

Modul elektronik tersedia 54 modul pelatihan :

25 pelatihan yang sudah siap guna secara online, diantaranya :

- Internalisasi pelatihan revolusi mental; Resolusi Konflik, Ganis PKBR, Bakti Rimbawan, Pendampingan Masyarakat.
- Yang sedang disusun untuk dapat digunakan secara online adalah diklat Ganis PHPL



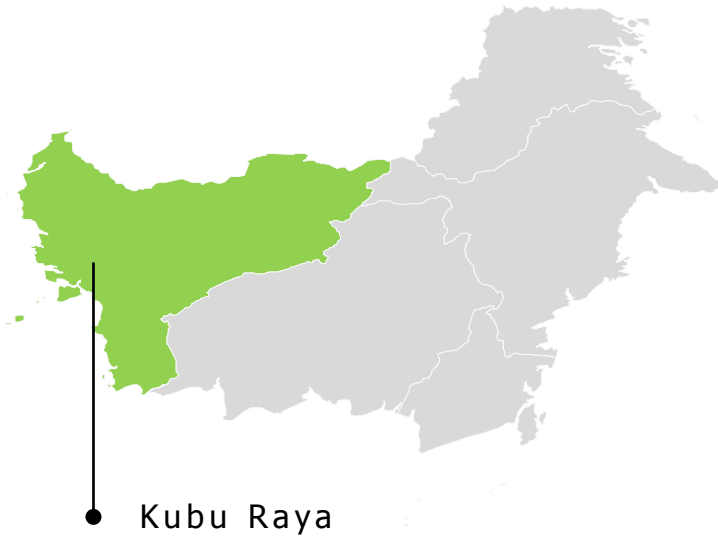
Pelaksanaan Pelatihan menggunakan metode *e-learning* tahun 2018, dengan jenis sebagai berikut:

- Resolusi Konflik
- Pemberdayaan Masyarakat
- Pengamanan Hutan
- Inventarisasi Satwa Liar
- Pengelolaan Jasa Lingkungan
- Kewirausahaan
- Teknik Pemasaran
- Pemanfaatan Hutan Bukan Kayu
- Perencanaan KPH
- GIS



MODEL BISNIS DAN CONTOH PS

HUTAN DESA BENTANG PESISIR KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT



Rp.229.320.000

Total penjualan per bulan. Produksi madu per bulan 750 kg yang dikeas sebanyak 1.764 berisi 425 gram. Harga setiap kemasan sebesar Rp.130.000

Rp.40.098.124

Nilai pendapatan dari perikanan air tawar dengan mengusahakan sylvofishery dalam keramba kepiting dan pemanfaatan arang batok.

16,04

Kali lipat dari pendapatan rata dengan adanya perhutanan sosial



HUTAN DESA BENTANG PESISIR PADANG TIKAR, KUBU RAYA

GAMBARAN HUTAN DESA BENTANG PESISIR PADANG TIKAR

Luas 76.370 ha. Hutan Lindung 69.299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1.985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5.086 ha

Bagian wilayah administratif 10 Desa, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya

Jumlah Penduduk 30.656 jiwa. Laki-laki 15.614 jiwa dan perempuan 15.042 jiwa

Gambaran Mini Indonesia. Terdiri dari Ekosistem Perairan dan Daratan

Terdapat 3 jenis hutan. Ekosistem Mangrove 39.820 ha, Gambut 34.927 ha dan Hutan Mineral 1.604 ha

Akses transportasi. Hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur air. Waktu tempuh Speedboat 1,5 jam dan Kelotok 8 Jam



"DESA SELAMA INI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN TERHADAP KAWASAN HUTAN PADAHAL BERADA DIDALAM WILAYAH DESA"

PENDEKATAN BENTANG ALAM DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA

- Kondolidasi Desa dan Masyarakat**
Pembangunan kawasan Perdesaan terintegrasi di semua sektor
- Manajemen Perlindungan dan Rehabilitasi**
Gotong royong dalam melakukan pengawasan untuk perlindungan dan melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis
- Manajemen Pengelolaan dan Pemanfaatan Usaha**
Community entrepreneurship melalui Koperasi/BUMDES gabungan 10 desa
- Pengembangan Produksi**
Produk ramah lingkungan dan inovatif berbasis potensi lokal
- Distribusi dan Pemasaran Produk:**
Kapasitas produksi besar dan stabil.
- Lembaga Keuangan**
Konsolidasi permodalan masyarakat dan penataan keuangan keluarga

PERENCANAAN PERDESAAN TERINTEGRASI BERBASIS POTENSI WILAYAH

ZONA I: PERAIRAN DAN PULAU - PULAU KECIL

- Jalur Penangkapan Ikan IA 43.100 ha
- Jalur Penangkapan Ikan IB 35.318 ha
- Jalur Penangkapan Ikan II 113.288 ha

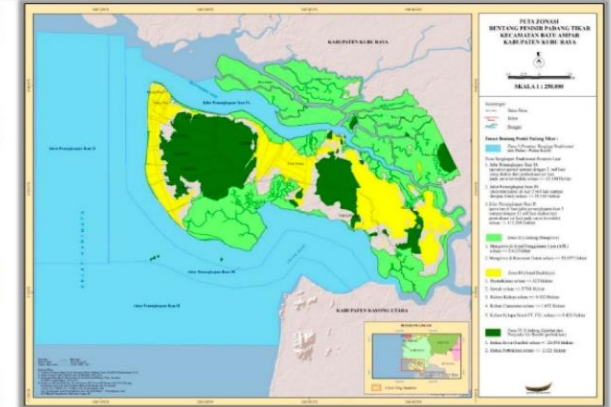
ZONA II: LINDUNG DAN PRODUKSI MANGROVE

- Lindung Mangrove APL 5.433 ha
- Lindung Mangrove Ijin HPHD 33.916 Ha
- Produksi Mangrove Ijin HPHD 904 Ha
- Produksi Mangrove Ijin IUPHH 15.007 Ha
- Produksi Mangrove Non Ijin 5.999 Ha

ZONA III: AREAL BUDIDAYA DAN PEMUKIMAN

- Permukiman 633 ha, Sawah 5.741 ha, Kebun Kelapa 9.432 ha, Kebun Campuran 1.052 ha dan Kebun Kelapa Sawit PT. FSL 9.429 ha

ZONA IV: PERLINDUNGAN GAMBUT DAN PERBUKITAN



RANTAI BISNIS AGROFORESTRY



NILAI JUAL PRODUK Kemasan Isi 5 Botol... id MADU KELULUT IDR 130 K HD Bentang Pesisir Padang Tikar	NILAI EKONOMI Produksi Per Bulan 750 Kg/Bulan Jumlah Madu Kemasan 1.764 Kemasan Harga /kemasan (425 Gr/Isi 5 Botol) Rp 130.000 Total Penjualan Rp. 229.320.000/Bulan	PEMASARAN Apotik Online
--	---	--

RANTAI BISNIS SYLVOFISHERY



Perhutanan Sosial **memberikan** kesempatan yang sama dengan peningkatan **kelipatan 16.04** dari rata-rata pendapatan saat ini **Rp2,5 juta/bulan** menjadi **Rp. 40.098.124,-/bulan**. Nilai diperoleh dari proyeksi 3 tahun kedepan dari proses pembelajaran dari pengembangan **Keramba Kepiting (Silvofishery), Budidaya Lebah Kelulut, Pemanfaatan Limbah Arang Batok.**



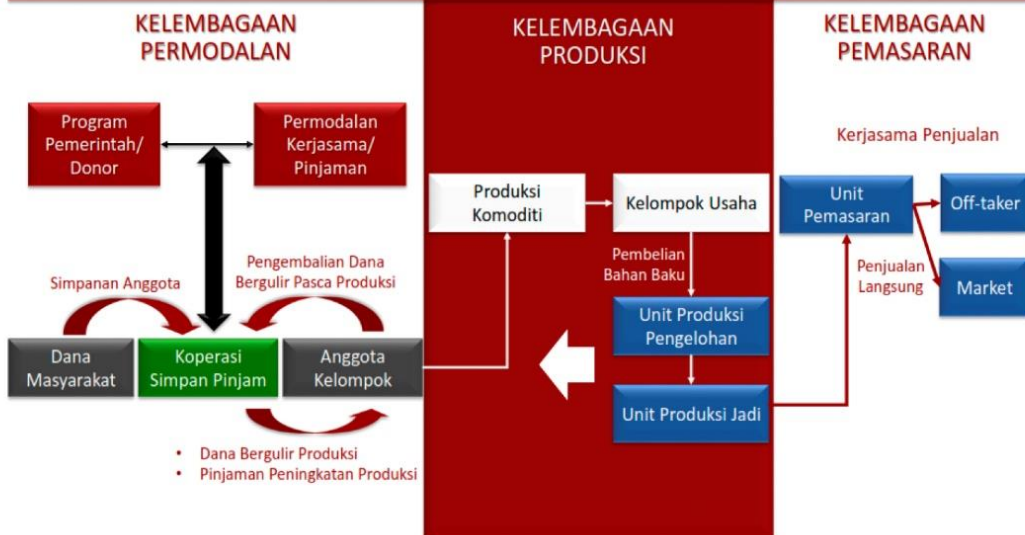
SKENARIO PEMBANGUNAN HUTAN DESA BPPT



KEKAYAAN ALAM BENTANG PESISIR PADANG TIKAR

	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV
Yang sudah dimanfaatkan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ikan Kakap Ikan Bawal Ikan Tenggiri Ikan Gembung Ikan Mayong Ikan Pari Cumi-cumi Ubur-Ubur Renjong Udang Rebon Udang Wangkang 	<ul style="list-style-type: none"> Kayu (Nyirih, Tumuk, Nibung, dll) Madu Mangrove Nipah (Tepung nipah, gula nipah, lidi) Keeping bakau Udang Ekowisata Berpetualang, Berekreasi dan Belajar Alam Karbon Mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> Kopi Liberika dan Robusta Beras Perkebunan Kelapa Pinang Ubi Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> Kayu (Meranti, Terentang, Gelam dan Punak) Rotan Asam Payak Air bersih Madu Gambut Karbon Hutan
Potensi Keaneekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pesut (<i>Orcaela brevirostris</i>) ➤ Penyu sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>) ➤ Tuntung Laut (<i>Callagur borneoensis</i>) ➤ Anjing Laut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buaya Muara (<i>Crocodylus Porosus</i>) ➤ Buaya Senyulong (<i>Tomistoma schlegelii</i>) ➤ Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>) ➤ Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>) ➤ Monyet ekor panjang (<i>Macaca fascicularis</i>) ➤ Lutung (<i>Trachypithecus auratus</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Macan dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>) ➤ Beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>) ➤ Kucing hutan (<i>Felis bengalensis</i>)

SKEMA KELEMBAGAAN



KONSEP PENGELOLAAN HUTAN DESA BENTANG PESISIR PADANG TIKAR

Perlindungan dan Pemulihan

Melakukan perlindungan terhadap tutupan hutan tersisa di KH dan APL

1. Perlindungan terhadap Tutupan Hutan di Hutan Lindung HPHD 69.220 ha (Mangrove dan Gambut), serta Tutupan Hutan di APL 5.433 ha (Mangrove)
2. Rehabilitasi dan restorasi terhadap lahan kritis seluas 16.749 Ha dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi maupun ekologi
3. Pengembangan inovasi ekonomi dengan mengoptimalkan produksi hasil hutan bukan kayu.

Produksi

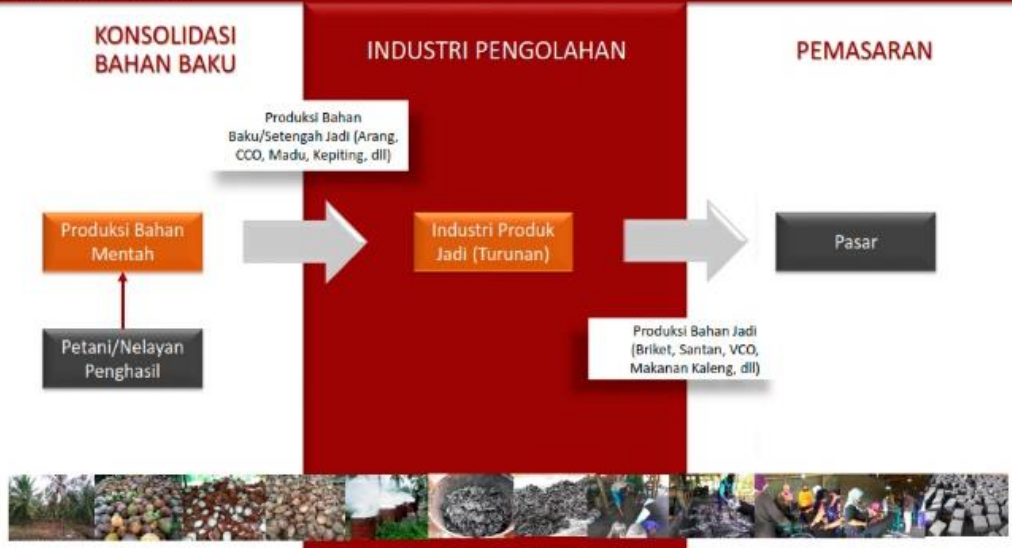
Meningkatkan produktifitas komoditi dalam satu bentang

1. Hutan Produksi di HPHD 7.071 ha, dan HP Non ijin 5.999 Ha, serta APL 33.421 ha.
2. Pengembangan industri masyarakat berbasis kayu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pasar.

No	Desa	Pembagian Kawasan			Luas (ha)	PAK-HD
		HL	HPT	HPK		
1	Padang Tikar 1	192	-	-	192	SK MenLHK No. 523 Tahun 2017
2	Medan Mas	1.846	-	-	1.846	SK MenLHK No. 522 Tahun 2017
3	Tasik Malaya	2.852	-	-	2.852	SK MenLHK No. 521 Tahun 2017
4	Sungai Besar	2.897	-	-	2.897	SK MenLHK No. 520 Tahun 2017
5	Sungai Jawi	3.289	-	94	3.383	SK MenLHK No. 525 Tahun 2017
6	Ambarawa	2.934	-	1.839	4.773	SK MenLHK No. 519 Tahun 2017
7	Nipah Panjang	6.829	-	113	6.942	SK MenLHK No. 524 Tahun 2017
8	Batu Ampar	31.550	1.590	-	33.140	SK MenLHK No. 515 Tahun 2017
9	Tjg Harapan	14.315	395	2.735	17.445	SK MenLHK No. 518 Tahun 2017
10	Telok Nibung	2.595	-	305	2.900	SK MenLHK No. 516 Tahun 2017
TOTAL		69,299	1,985	5,086	76,370	



SKEMA PRODUKSI



PERHUTANAN SOSIAL UNTUK PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI DESA



Perhutanan Sosial **memberikan** kesempatan yang sama dengan peningkatan **kelipatan 16.04** dari rata2 **Rp2,5 juta** menjadi **Rp. 40.098.124,-**.

Nilai diperoleh dari pembelajaran dari pengembangan **Keramba Kepiting (Silvofishery), Budidaya Lebah Kelulut, Pemanfaatan Limbah Arang Batok**



SKEMA BAGI HASIL



KEPITING



MADU KELULUT



BRIKET

	KEPITING	MADU KELULUT	BRIKET
Proyeksi Pendapatan 3 Tahun	3 unit karamba Rp. 8.684.708,- x 3 unit = Rp. 26.054.124,-	100 kotak madu kelulut. Pendapatan perbulan Rp. 113.890,- x 100 Kg = Rp. 11.389.000,-	
Hasil Panen	<ol style="list-style-type: none"> Hasil panen/bulan = 3,5 ons x 600 ekor = 210 Kg x Rp. 80.000,-/Kg = Rp. 16.800.000,- Resiko kematian 5% x Rp. 16.500.000,- = Rp. 825.000,- Biaya bibit = Rp. 4.500.000,- Biaya pakan 30 hari = Rp. 525.000,- Biaya perawatan 30 hari = Rp. 1.500.000,- Biaya penyusutan 1 unit karamba 24 bulan = Rp. 765.292,- Total 1 unit Rp. 8.684.708,-	<ol style="list-style-type: none"> Hasil madu 1 unit kotak = Rp. 130.000,- x rata-rata 1 Kg = Rp. 130.000,- Biaya penyusutan kotak 3 tahun = Rp. 400.000,- : 36 bulan = Rp. 11.110,- Biaya pemanenan Rp. 5.000,- Total modal 1 kotak = Rp. 113.890,-	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata petani memiliki 3 Ha kebun kelapa 3 Ha kebun kelapa menghasilkan 3.540/Ha x 3 Ha = 10.620 buah 10.620 buah tempurung = 2.124 Kg tempurung menghasilkan 531 Kg arang kering x Rp. 5.000,- = Rp. 2.655.000,-
Modal Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Biaya karamba/unit = Rp. 18.367.000,- Biaya Bibit (Rp. 30.000,-/Kg x 150 Kg (600 ekor) = Rp. 4.500.000,- Biaya pakan 3,5 Kg/hari x 30 hari x Rp. 5.000.000,- = Rp. 525.000,- Biaya perawatan (Rp. 50.000,-/hari x 30 hari) = Rp. 1.500.000,- Total modal 1 unit karamba = Rp. 24.892.000,-	<ol style="list-style-type: none"> Biaya pembuatan 1 unit kotak = Rp. 400.000,- Biaya pemindahan koloni = Rp. 100.000,- Total modal 1 kotak = Rp. 500.000,-	

HD SUNGAI BULUH PADANG PARIAMAN, SUMBAR

522.4-789-2014, TANGGAL 16 OKTOBER 2014



Hutan Nagari, luas 1.336 Ha (HL) dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh Jumlah penduduk 3.524 KK.

EKOWISATA SUNGAI BULUH

Jumlah pengunjung **1.890 org/bulan**
Pendapatan rata-rata **Rp.18,1 jt/bulan;**

PEMANFAATAN HHBK:

Rotan dan Kayu Ransam dijual

Rp.1 jt/bulan;

Budidaya jamur tiram menjadi makanan olahan **Rp. 2,4 jt /bulan.**



Contact Person:

Ketua kelompok : A. Dt. Rajo Batuah: 0812 6631 0447

Pendamping : pm / 08....

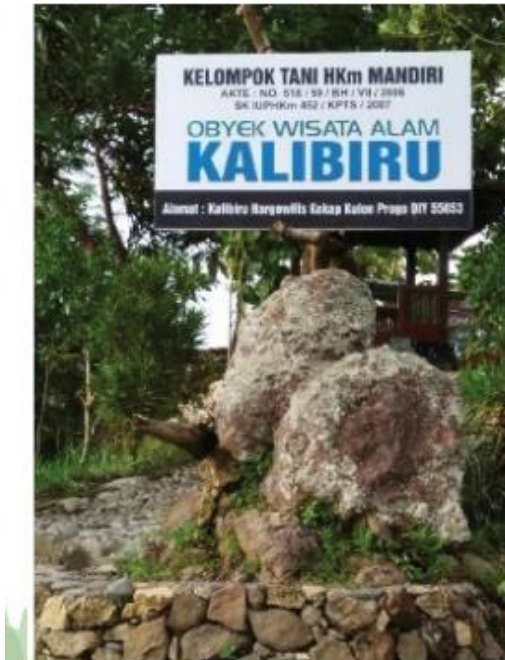
KPH: pm / 08....

HKM KALIBIRU POLA EKOWISATA

KAB. KULONPROGRO, PROV. DIY

Luas HKm Kalibiru 167,2 Ha
dikelola oleh 673 KK

RANTAI BISNIS EKOWISATA



NILAI EKONOMI

Pendapatan petani HKm berada antara Rp1 juta hingga Rp140 juta.
Rata-rata pendapatan petani HKm Rp28.340.724 per tahun atau Rp2,36 juta per bulan

Pengunjung sampai dengan Tahun 2017
Pengunjung Harian = ± 600 Orang
Pengunjung Sabtu Minggu = ± 1.500 – 2.000 Orang
Pengunjung Hari Raya = ± 6.000 Orang
Penyerapan Tenaga Kerja : 238 orang

NILAI EKOLOGI

Sumber daya alam terjaga karena tidak dieksploitasi

NILAI SOSIAL

Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota KTH dan masyarakat disekitarnya.

HKM BUHUNG LALI, BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

SK. 363/MENHUT-II/2011 TGL 7 JULI 2011

Luas HKM Bulukumba 912 Ha

Dikelola oleh 1.231 Kepala Keluarga (KK)

Tegakan Jati Lokal, Mahoni, dan Coklat
di dalam Lokasi HKM



Hasil Sadapan Nira di lokasi HKM



Proses Pembuatan Gula Semut



View dari puncak & Goa Alami di dalam lokasi HKM



**Potensi kawasan yang telah
dikembangkan antara lain :**

Hasil Hutan Bukan Kayu

Gula Aren (gula semut) yg telah dikemas dg volume produksi 300 Kg/ bulan. (Harga Jual Rp. 20.000/Kg profit rata-rata Rp. 3.000.000,-/ bln.

MPTS: Kakao, Kemiri, Durian, Buah-buahan, Aren, Jambu Mente, dsb.

Wisata Alam

Pemandian keramat, gua di puncak bukit, camping ground, dsb. (akan dikembangkan kerjasama dg Dinas Pariwisata)

Potensi Kayu

Jati lokal, Mahoni, Gmelina.



**Juara 1
lomba HKM Nasional
Tahun 2015**



**HTR MUNA,
MUNA, SULAWESI TENGGARA**
SK. 186/2017, 187/2017, 188/2017. TANGGAL 26 JANUARI 2017



Luas HTR Muna 1.817 Ha dan dikelola oleh 3 Koperasi Serba Usaha (KSU)



Jati mempunyai sejarah yang panjang bagi masyarakatnya. Jati atau kuli dawa (artinya kayu yang berasal dari Jawa) dikenal masyarakat Muna sejak daerah itu dimasuki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan hutan jati dijadikan sebagai tanaman (jati kultur) mulai dikembangkan pada tahun 1911.

Pemberantasan **Illegal Logging**, perambahan kawasan, peningkatan SDM kehutanan, serta penataan ulang pengelolaan hutan menjadi tujuannya sesuai dengan prosedur pembangunan KPH.

Dibangun Laboratorium Kultur Jaringan untuk menghasilkan bibit unggul untuk memenuhi kebutuhan bibit di areal HTR.

HTR BATU JANGKIH

LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT

SK. 52/2011 TANGGAL 8 MARET 2011

Luas HTR Batu Jangkih 130,22 Ha (Dikawasan Hutan Produksi)
Dikelola oleh 2 Koperasi (Koperasi Maju Bersama dan Makmur Bersama)



Berstatus hutan yang kritis, gundulnya hutan, mata air yang mulai menghilang dikarenakannya eksploitasi dan perambahan hutan secara besar-besaran pada tahun 1998.

Namun dengan diikutsertakannya masyarakat desa batu jangkih dalam pengelolaan hutannya konsep wirausaha perhutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan menjadi tujuan dari masyarakat Desa Batu Jangkih. Melalui sistem wanatani/agroforestry yang diterapkan disini membuat roda perekonomian kembali bergerak

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK):
Nangka, Mangga, Mete, dll
Tanaman empon-empon (Kunyit, Laos, Jahe, Kencur, Cabai).

KEMITRAAN KEHUTANAN KPHP GEDONG WANI DENGAN AGROFOREST FOREST PARK TANGGAMUS, LAMPUNG TANGGAL 5 OKTOBER 2016

Luas Kemitraan Kehutanan KPHP Gedong Wani
dengan Agro Forest Park 1.272 Ha



KTH Agro Forest Park melakukan pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi. Dengan menanam 4.000 batang tanaman diantaranya gaharu, jati, durian montong, karet.

KTH Agro Forest Park juga melakukan pola tanam agroforestry dengan menanam tanaman pangan jagung dan padi.

HA AMMATOA KAJANG BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN

SK.6742/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016
TANGGAL 28 DESEMBER 2016

Luas HA Ammatoa Kajang 313,99 Ha
dikelola oleh 2.000 Kepala Keluarga (KK)



Fungsi konservasi dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang yang hidup di Kabupaten Bulukumba. Tidak ada fungsi ekonomi didalamnya.

Kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu Manuntungi Ada' yang bersumber dari 'Pasang rikajang' yaitu berupa pesan, petuah, amanah yang sifatnya sakral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan



IPHPS - MUARA GEMBONG SESUDAH DAN SEBELUM

NO. 3727/MENLHK-PSKL/KUM.1/7/2017
80,90 HA UNTUK 38 KK

1

SEBELUM



Kondisi tambak dangkal..



Apabila pasang tergenang air laut

2

PENGERJAAN



Awalnya dilakukan secara manual



Proses semakin cepat setelah

3

SESUDAH



Telah dilapisi plastik LDPE dan



Tambak sudah selesai dan siap

Kondisi Petak 3 Dalam Program Perhutanan Sosial

IPHPS - TUBAN

SK KULIN KK NO. 5683/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017
TANGGAL 27 OKTOBER 2017

LMDH Ngimbang Makmur Overview



Pemilihan komoditas jagung sebagai tanaman agroforestry menjadi pertimbangan lokasi, pangsa pasar dan proses budidaya.

Secara umum juga Tuban dikenal sebagai daerah penghasil komoditas jagung yang berlimpah dan pakan ternah banyak membeli jagung yang menjadikan Tuban sebagai lumbung persediaan mereka.



Gambar : Salah satu pengunjung mancanegara sedang patroli gajah di Tangkahan, Langkat, Sumatera Utara. Kawasan ini meraup pendapatan sebesar Rp. 12 Miliar per tahun dengan mengusahakan ekowisata di pinggiran TN. Gunung Leuser.





TN. KOMODO

CERITA DARI TAPAK

Kehadiran TN. Komodo telah memutar ekonomi di Labuhan Bajo pada tahun 2017 sebesar Rp. 762 Milyar. Menyerap tenaga kerja sebesar 1.895 orang.



Penjual kain di Labuhan Bajo rata-rata menjual 5-6 lembar kain setiap hari. Jumlah kapal di labuhan bajo lebih dari 300 kapal yang pada akhir pekan cenderung penuh untuk mengangkut wisatawan berkeliling di TN. Komodo

TN. BALI BARAT



Catatan : sepasang Jalak Bali berumur 2 bulan seharga Rp.15 juta. Induk yang produktif seharga Rp.35 juta.



Mengajak serta masyarakat untuk menangkarkan Jalak Bali, bermuara pada 2 hal sekaligus : peningkatan pendapatan masyarakat dan kelestarian Jalak Bali.



TN. GUNUNG MERBABU



Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Zona Tradisional TN. Gunung Merbabu sebagai Top Selfie

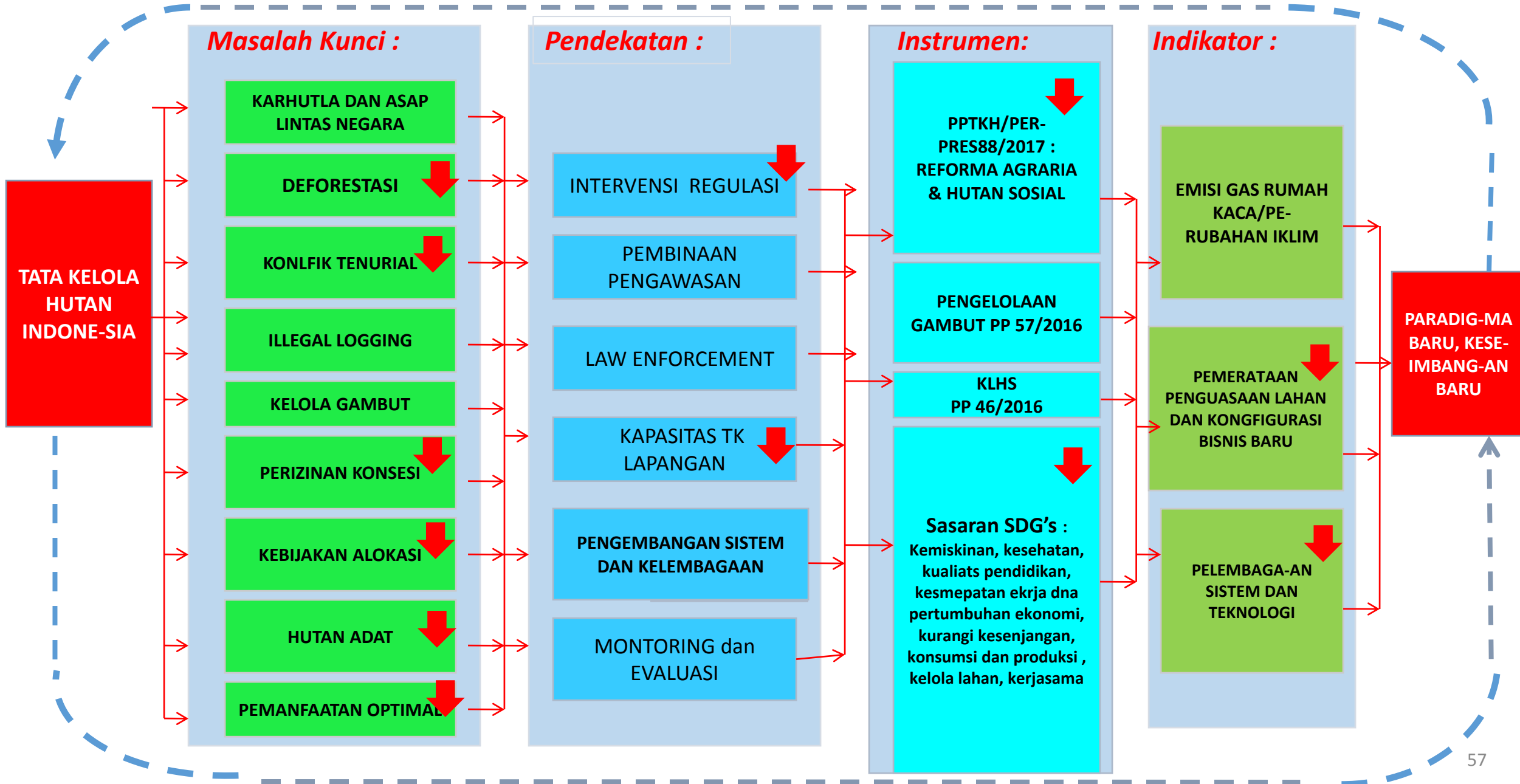


Reza, 18 tahun, seorang fotografer di Top Selfie Kragilan. Kamera yang dimilikinya sudah milik pribadi hasil motret dengan penghasilan rata-rata di hari biasa 200 ribu dan 400-600 ribu di hari libur. Selain Reza terdapat 50an lebih fotografer, baik pemuda maupun pemudi, yang ada di sana, masing-masingnya memiliki lebih dari 1 kamera bahkan hingga 8 kamera hasil dari jasa fotografi.

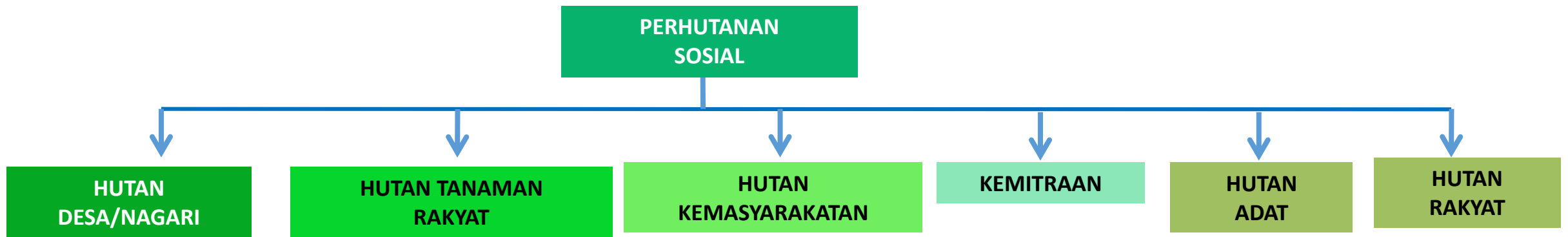


CATATAN PENUTUP

PARADIGMA BARU TATA KELOLA HUTAN INDONESIA POLA PRESIDEN JOKOWI



IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL: **HUTAN SOSIAL UNTUK PEMERATAAN EKONOMI**



ELEMENTS	DESCRIPTION	
ULTIMATE GOALS	Keywords : Hutan Sosial Untuk Pemerataan Ekonomi	
INDICATORS	1) Gross Margin Kelompok/Rumah Tangga 2) Penyerapan tenaga kerja 3) Pertumbuhan ekonomi wilayah dan Gini ratio	
MEANS	1) Akses kawasan, berupa perijinan dan Kemitraan Pembinaan Kelompok Tani Hutan 2) Investasi Sarana dan SDM	
VALUES	1) Pemanfaatan untuk kesejahteraan (HHK, HHBK, Jasa lingkungan) 2) Partisipasi Masyarakat 3) Respect to Ecology, function of nature 4) Konservasi dan perlindungan hutan, suksesi, keseimbangan/homeostasis 5) Kesadaran untuk preservasi, restorasi dan rehabilitasi	
IMPLEMENTATION	RANTAI BISNIS (diuraikan kemudian) 1) Jasa Lingkungan/Ekowisata/Tata Air 2) Agro forestry : padi, jagung, kedelai, tebu, 3) Silvo Pastur 4) Silvofishery 5) Biomass dan bioenergy (kemiri sunan, aren, eucaliptus, calliandra, nyamplung, dll) 6) HHBK: madu, rotan, akar, dll 7) Industri kayu	KONSEKWENSI (Investasi, Teknologi, Kelembagaan Masy) 1) Ijin dan legitimasi (syarat dan the do's and dont's) 2) Penataan wilayah (konflik : use and status)/ tenurial 3) Infrastruktur 4) Revitalisasi Kelompok Tani Hutan 5) Investasi (negara dan swasta) 6) Review kawasan (limittaif) 7) Pendampingan Aktivistis 8) Pengawasan Aparatur

CONCLUDING REMARKS :

Dari tapak ke tapak, dan produktivitas rakyat



1. **Fasilitasi Akses Lahan (TORA atau Hutan Sosial)**
2. **Fasilitasi Kesempatan Berusaha (Sarana Produksi dan Pasar/offtaker)**
3. **SDM dan Pendampingan (Akademisi, LSM/Aktivis, Penyuluh/Aparat)**
4. **Fasilitasi Dukungan Finansial : Kredit Usaha Rakyat (KUR), BLU Kehutanan**
5. **Skema bisnis rakyat dan swasta, off-taker (konfigurasi bisnis baru di lapangan dan masyarakat menjadi pelaku usaha) dengan cara : Pengembangan usaha dengan cluster, berkelompok, ada oftaker, Pendampingan finansial/KUR dan Peningkatan teknis manajemen**



TERIMA KASIH